



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS JOKO PRAMONO**
2. Jabatan : **WAKIL KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)**
3. NHK : **196287**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.320.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m²/120 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 355 m²/229 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 27 m²/25 m² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m²/208 m² di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 500.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOBIL, PEUGEOT RCZ Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.530.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 7.353.657.379**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.581.602.559**F. HARTA LAINNYA** Rp. 616.466.949

Sub Total Rp. 16.901.726.887

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 16.901.726.887

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.